



Media Title	Pos Kota		
Head Line	130 Warga Petukangan tolak ganti rugi, Operasional JORR W2 bisa molor		
Date	4 November 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	26	Article Size	
Journalist		Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

## 130 Warga Petukangan tolak ganti rugi Operasional JORR W2 bisa molor

JAKARTA (Pos Kota) - Pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) Kebon Jeruk-Ciledug masih terkendala pembebasan lahan.

Sebagian warga menolak tanahnya dibebaskan. Mereka meminta ganti rugi yang lebih besar. Padahal operasional tol yang dibangun sejak 2011 itu dinanti masyarakat karena dapat mengurangi kemacetan.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan menduga ada mafia tanah di balik warga yang tetap mempertahankan tanahnya. Jika tidak ada jalan keluar, Pemprov DKI Jakarta bisa menggunakan undang-undang untuk memperlancar proses pembebasan lahan. "Bisa saja dititipkan ke pengadilan untuk pembayarannya, karena ini memang untuk kepentingan publik," kata Azas ketika dihubungi, Minggu (3/11).

Ia menyebut operasional JORR W2 bisa menjadi alternatif kendaraan berat

melintas. Sehingga kendaraan berat tidak lagi melewati dalam kota.

### JOKOWI TURUNTANGAN

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Aliman Aat meminta Gubernur DKI Jakarta Jokowi turun tangan menyelesaikan masalah ini.

Jokowi mampu menyelesaikan masalah pedagang Kaki-5 di sekitar Pasar Tanah Abang yang direlokasi ke Blok G, kemudian pemindahan warga di Waduk Pluit ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa). "Urusan Waduk Ria Rio, Blok G, Pak Jokowi bisa menyelesaikan. Untuk urusan ini juga harus turun tangan," ucapnya.

Untuk memberikan fasilitas publik memang harus ada yang dikorbankan. "Tapi ini kan juga diganti rugi bahkan sudah ada tim appraisal."

### AKHIRTAHUN INI

Seperti diketahui, tol JORR W2 Kebon Jeruk-Ciledug sepanjang 7 kilo-

meter rencananya dapat dilintasi akhir tahun ini.

Tahap itu meliputi penyelesaian perangkat rambu lalu lintas, pemasangan mesin di seluruh gardu tol, pelapisan, pemasangan marka jalan, dan landscaping atau pemberian tanaman di sepanjang tol. Selain itu juga, masih menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan pemeriksaan oleh Badan Pengatur Jalan Tol.

Proyek ini dimulai 21 Oktober 2011 dan terbagi em-